



# Selesaikan Akar Masalah Daycare

- Tidak boleh ada kompromi terhadap keselamatan dan perlindungan anak.
- Pemerintah pusat dan daerah akan memperkuat regulasi dan perizinan.
- Kepolisian menetapkan 13 tersangka dalam kasus di Yogyakarta.

**FICKY RAMADHAN**  
[ficky@mediaindonesia.com](mailto:ficky@mediaindonesia.com)

**P**EMERINTAH harus mengevaluasi total sistem pengawasan dan perizinan tempat penitipan anak di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan menyusul dugaan kekerasan terhadap 53 balita pada tempat layanan asuh anak atau daycare bernama Little Aresha di Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Langkah konkret dari pemerintah untuk menyelesaikan akar persoalan, mulai standar kurikulum hingga kualitas pengasuh, sangat ditanti. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keamanan operasional lembaga tersebut melalui dinas pendidikan di daerah. "Pengawasan harus diperketat dan standar layanan daycare harus benar-benar ditegakkan. Tidak boleh ada kompromi terhadap keselamatan dan perlindungan anak," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani di Jakarta, kemarin.

Lalu menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden yang mencenderei ruang aman bagi anak tersebut. Ia pun memastikan pihaknya segera memanggil Mendikdasmen Abdul Mu'ti guna membahas penguatan standar pendidikan dan pengasuhan. "Di dalamnya, termasuk penguatan sistem pengawasan dan perlindungan anak. Negara harus hadir memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan maksimal," ujarnya.

#### DARURAT PERIZINAN

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengungkapkan fakta mencengangkan mengenai legalitas daycare di Indonesia. Pihaknya mencatat mayoritas tempat penitipan anak ternyata belum memiliki izin resmi. "Kualitas layanan masih menjadi tantangan besar. Sekitar 44% belum memiliki izin atau legalitas dan hanya 30,7% yang memiliki izin operasional," ungkap Arifah.

Data lebih lanjut menunjukkan hanya 12% daycare yang memiliki tanda daftar, 13,3% berbadan hukum, dan 20% belum memiliki prosedur operasional standar (SOP). Bahkan, 66,7% sumber daya manusia (SDM) pengelola di lapangan juga belum tersertifikasi.

Arifah berharap tragedi di Yogyakarta menjadi titik awal evaluasi nasional. "Ke-

depan, pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat regulasi, perizinan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan daycare agar kasus serupa tidak kembali terjadi," katanya.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji turut mengonfirmasi bahwa daycare Little Aresha tidak mengantongi izin. Wihaji pun telah menginstruksikan pemeriksaaan terhadap taman asuh sayang anak (tamasya) di bawah binaan kementeriannya.

"Saya kira itu pembelajaran yang paling penting buat masyarakat juga, jangan sembarangan juga menitipkan anaknya di daycare, tapi juga jangan takut. Kalau di biarkan kita insya Allah dengan pengawasan dan pengelolaan yang kuat di kementerian kita," tutur Wihaji.

#### KEKERASAN SISTEMATIS

Komisiner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Djihad Puspitarini menyebut kasus di Yogyakarta sebagai pengadilan terbesar yang ditangani lembaganya dalam tiga tahun terakhir. Dari 103 anak yang ditipikan, 53 di antaranya terindikasi menjadi korban kekerasan.

Ia menyebut perizinan yang nihil dan SOP yang menyimpang menjadi faktor utama kekerasan itu terjadi secara kolektif oleh para pengasuh. "Ada pedoman yang dilakukan daycare bahwa dugaan kekerasan ini terjadi secara sistematis dan terstruktur karena dilakukan lebih dari tiga, empat, bahkan 10 orang," ucapnya.

Sementara itu, penjeratan anak Nahar menyoroti kerumitan koordinasi birokrasi di daerah yang kerap menjadi celah bagi pengelola daycare nakal. Mantan Deputy Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA itu menilai perizinan sering kali melibatkan banyak pintu, mulai dinas pendidikan, dinas sosial, hingga dinas PPA.

Ia mendesak agar pemberian izin dilakukan dengan selektif melalui pengecekan pembinaan dan akreditasi SDM yang ketat. "Lembaga pemberi izinnya tidak satu. Ketiga lembaga ini di daerah, mekanisme koordinasi pemberian izin dan pengawasannya harus terus ditingkatkan."

#### LANGKAH HUKUM

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan komitmennya untuk segera menjalankan arahan pemerintah pusat terkait dengan pembenahan regulasi di daerah. Ia memastikan pemulihan korban dan pendampingan bagi orang tua menjadi prioritas utama.

Sejauh ini, Polresta Yogyakarta telah menetapkan 13 tersangka, termasuk ketua yayasan bernisial DK, Si, dan kepala sekolah AP, 42.

Sisnnya merupakan pengasuh yang terlibat langsung dalam tindak kekerasan dan penelantaran anak. Kasus itu menambab daftar panjang kekerasan di lembaga pengasuhan menyusul insiden serupa di Kota Depok, Jawa Barat, pada 2024 yang melibatkan penganiayaan fisik terhadap balita. (lam/Ata/AT/Ant/P-2)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005